

Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-Budaya)

*Anselmus Agung Pramudito*¹

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada

Abstract

Intercultural marriages have an actual percentage increase in different countries over time. One of the things that should be observed in intercultural marriage is that in married couples in the same culture, we will discover the uniqueness of individual personality traits that become one of the determinants for individuals in adapting to marital relationships, whereas in intercultural marriage relationships, there are many differences in cultural values brought by both individuals from birth and on the one hand it is possible to contradict so that it can complicate the process of adaptation in marriage and increase the likelihood of conflict during the marriage from time to time. From literature review, the emergence of conflict due to cultural differences can lead to marital dissatisfaction that can lead to the intention and decision to divorce. In view of the growing intercultural marriage trends in many countries over time, this paper will specifically review the potential for conflict due to cultural differences in intercultural marriages, and will also address individual aspects of cultural differences as a triggering factor conflicts in intercultural marriages, and conflict management models that will be determinants of intercultural marriage achievement to provide a discourse on how to manage conflicts appropriately so that intercultural partners can sustain their marriage well into the elderly. In general, the use of integrating and compromising models in managing conflict will maintain a harmonious relationship that supports the achievement of marital satisfaction in intercultural couples.

Keywords: cultural differences, conflict management style, intercultural marriage, marital conflict

Pengantar

Perkawinan antar-budaya secara umum merupakan suatu bentuk relasi sepaasang pria dan wanita yang berasal dari dua suku, ras dan kebudayaan yang berbeda dalam suatu ikatan komitmen secara institusional. Meskipun berasal dari dua kebudayaan yang berbeda dan memerlukan proses adaptasi yang melebihi perkawinan dalam satu budaya, perkawinan antar-budaya justru menunjukkan kenaikan persentase

dari waktu ke waktu. Data hasil survei *Pew Research Center* (Wang, 2012) dan *United States Census Bureau* (Lewis Jr & Ford-Robertson, 2010) menunjukkan bahwa tren perkawinan antar-budaya di Amerika mengalami peningkatan persentase dari 3,2% pada tahun 1980 menjadi 5,6% pada tahun 2000 dan 8,4% pada tahun 2010. Data hasil survei longitudinal *Decennial Census and Current Population* (Spörlein, Schlueter, E., & van Tubergen, 2014) pada tahun 1880-2011 di Amerika juga menemukan bahwa persentase perkawinan dalam satu budaya yang sama (endogami) mengalami penurunan secara keseluruhan dari sekitar

¹ Korespondensi mengenai artikel ini dapat dilakukan melalui: anselmodito@yahoo.com

60-70% pada tahun 1880 menjadi sekitar 40-50% pada tahun 2000. Di sisi lain, kecenderungan kelompok pendatang untuk melakukan perkawinan antar-budaya mengalami peningkatan persentase sebesar 27% selama kurun waktu tersebut. Dalam perspektif longitudinal, tren peningkatan perkawinan antar-budaya di Amerika sejak tahun 1880 memberikan dampak jangka panjang pada peningkatan persentase perkawinan antar-budaya di Amerika pada masa sekarang (Spörlein, *et al.*, 2014).

Tren perkawinan antar-budaya di Amerika juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah populasi penduduk Amerika yang memiliki darah keturunan campuran berdasarkan data *United States Census Bureau* (Lewis Jr & Ford-Robertson, 2010) dalam perbandingan persentase pada tahun 1980 dan 2007 yang menunjukkan bahwa persentase jumlah warga keturunan campuran Hispanik-Amerika berkembang secara signifikan dari 6,5% menjadi 15,1%, sedangkan persentase warga keturunan Asia-Amerika meningkat sebesar 1,5% menjadi 4,4% dan peningkatan jumlah warga keturunan Afrika-Amerika dari 11,1% menjadi 12,2%. Di sisi lain, persentase jumlah populasi warga kulit putih sendiri mengalami penurunan yaitu dari 80,7% menjadi 66% pada kurun waktu yang sama (Lewis Jr & Ford-Robertson, 2010).

Penelitian lainnya (Luke & Oser, 2015) pada kelompok keturunan campuran di Amerika menemukan sebanyak 56% responden wanita Afrika-Amerika (N=643) menyatakan keinginannya untuk berpasangan dengan pria kulit putih. Hampir serupa dengan penelitian Djamba dan Kimuna (2014) yang menggunakan data *General Social Survey* menunjukkan bahwa 54% responden kulit hitam di Amerika (N=227) bersedia untuk menikah dengan orang kulit putih, tetapi hanya 26% responden kulit putih (N=1.064) yang

bersedia menikahi orang kulit hitam. Dengan demikian, dari beberapa paparan data dalam studi perkawinan antar-budaya di Amerika, meskipun berbeda persentasenya antara penduduk keturunan asli Amerika dan penduduk keturunan campuran, probabilitas penduduk Amerika secara keseluruhan untuk menjalani relasi perkawinan antar-budaya menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, topik mengenai perkawinan antar-budaya masih menimbulkan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Berdasarkan data hasil survei *Pew Research Center* di Amerika, sebanyak 43% masyarakat Amerika menyatakan bahwa menikah dengan orang dari ras yang berbeda telah membawa dampak yang lebih baik di masyarakat, sedangkan 11% menegaskan masih tidak menyetujui perkawinan antar-ras dan 44% lainnya menyatakan tidak ada hal yang berbeda ketika menikah dengan seseorang dari ras lain (Wang, 2012). Data hasil survei *Pew Research Center* di Amerika tersebut juga menemukan 63% masyarakat Amerika yang disurvei pada tahun 2010 menyatakan bahwa tidak akan menjadi masalah jika ada anggota keluarga atau kerabat dekat mereka yang menikah dengan orang dari ras atau etnis yang berbeda. Peningkatan persentase menjadi terlihat jelas ketika meninjau hasil survei yang sama pada tahun 1986 di mana hanya 33% yang dapat menerima hubungan perkawinan antar-budaya pada semua orang, termasuk jika itu terjadi pada dirinya sendiri (Wang, 2012). Bagi sebagian orang yang tetap tidak menyetujui, perkawinan dengan ras yang berbeda (khususnya dengan orang kulit hitam) masih dipandang sebagai sebuah "*social taboo*" (Grapes, 2000).

Tidak jauh berbeda, riset Herman dan Campbell (2012) yang melibatkan 1.000 orang responden di Amerika (246 etnis minoritas dan 754 warga kulit putih)

menemukan bahwa 29% responden kulit putih dengan tegas menolak hubungan antara penduduk kulit putih dengan penduduk keturunan Afrika-Amerika dan Asia-Amerika. Secara spesifik, Herman dan Campbell (2012) menyebutkan bahwa wanita kulit putih dimungkinkan untuk menyetujui hubungan antar-ras pada orang lain, tetapi tidak jika itu terjadi pada dirinya, sedangkan pria kulit putih memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk menjalani hubungan antar-ras secara personal, khususnya dengan orang Asia. Akan tetapi, jika dilihat secara keseluruhan, baik pria maupun wanita kulit putih menyatakan sangat tidak mungkin untuk menjalani hubungan berbeda ras, atau dengan kata lain, sikap positif yang ditunjukkan terhadap hubungan antar-ras tidak dapat diartikan sebagai kecenderungan yang tinggi pada realisasi hubungan perkawinan yang sesungguhnya (Herman & Campbell, 2012). Okamoto (2007) mengungkapkan bahwa perkawinan antar-budaya antara orang Asia dan orang kulit putih Amerika dapat berlanjut sebagai bentuk integrasi dua budaya selama kedua belah pihak tetap tidak disetarakan dalam hal pekerjaan, namun situasi sosial lainnya (seperti halnya dalam relasi pertemanan) berusaha memelihara dan mengembangkan interaksi antara kedua budaya tersebut dengan mendobrak batas-batas diskriminasi rasial.

Di Indonesia sendiri, data mengenai perkawinan antar-budaya, khususnya dengan warga negara asing, belum benar-benar tercatat secara jelas. Lembaga Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) menyayangkan belum adanya pencatatan data perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing secara pasti ([https://www.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-](https://www.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim.html)

[minim.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim.html)). Demikian halnya dengan perkawinan beda etnis dalam negeri yang datanya belum tersedia. Menelaah secara tidak langsung, data terakhir dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sebanyak 27.975.612 orang atau 11,77% dari total penduduk Indonesia melakukan migrasi seumur hidup. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai migran seumur hidup jika provinsi atau kabupaten/kota tempat seseorang dilahirkan berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggalnya pada saat penghitungan dilakukan (<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=324&wid=0>). Dari data dan pengertian tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan untuk sementara bahwa probabilitas terjadinya perkawinan antar-budaya atau beda etnis di Indonesia dimungkinkan berada pada taraf yang relatif cukup tinggi oleh karena migrasi seumur hidup yang dilakukan oleh sejumlah penduduk di Indonesia.

Terkait relasi perkawinan antar-budaya, khususnya beda etnis di Indonesia, terdapat beberapa literatur yang dapat dijadikan referensi, seperti pada penelitian kualitatif-fenomenologis Tuapattinaya dan Hartati (2014) pada tiga orang wanita Jawa yang menikah dengan pria beda etnis menunjukkan bahwa dua dari tiga subjek dalam penelitian tersebut menghadapi pertentangan dari orangtua mereka yang menginginkan subjek untuk menikah dengan pria Jawa. Sedikit berbeda dengan penelitian kualitatif Apriani, Sakti, & Fauziah (2013) yang mengemukakan bahwa permasalahan dalam perkawinan antar-budaya seperti pada wanita Jawa yang menikah dengan pria keturunan Tionghoa adalah adanya prasangka keluarga di mana prasangka orang Tionghoa terhadap wanita Jawa adalah boros dan malas sehingga salah satu cara mengatasi prasangka keluarga

menurut subjek adalah dengan bekerja membantu suami.

Secara keseluruhan, dengan melihat tren perkawinan antar-budaya yang semakin meningkat di beberapa negara dari waktu ke waktu, tulisan ini secara khusus akan meninjau berbagai permasalahan yang ada di balik perkawinan antar-budaya, khususnya potensi konflik akibat perbedaan budaya di dalamnya, kemudian akan membahas pula perbedaan aspek individual dalam relasi perkawinan antar-budaya yang menjadi akar permasalahan dalam perkawinan antar-budaya, serta model manajemen konflik yang akan menjadi determinan bagi pencapaian kepuasan perkawinan antar-budaya untuk memberikan wacana tentang bagaimana mengelola konflik secara tepat agar pasangan antar-budaya mampu mempertahankan keberlangsungan perkawinannya hingga tahap usia lanjut.

Pembahasan

Potensi Konflik di Balik Perkawinan Antar-Budaya

Di tengah tren perkawinan antar-budaya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, relasi perkawinan antar-budaya mengandung suatu resiko yang patut untuk mendapat perhatian. Salah satunya adalah adanya kemungkinan potensi konflik dalam perkawinan yang lebih besar jika dibandingkan dengan perkawinan pada satu budaya yang sama (endogami). Hal ini menarik untuk dicermati lebih lanjut. Ketika individu menjalin hubungan perkawinan antar-budaya, faktor karakteristik kepribadian individual menjadi salah satu faktor penentu awal bagi individu dalam melakukan proses adaptasi. Hal ini diungkap dalam hasil riset Lee, *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa orang Asia di Amerika yang menikah dengan orang yang

berasal dari budaya yang berbeda memiliki tingkat keterbukaan (*openness*), sifat kehati-hatian (*conscientiousness*), dan ekstrasversi (*extraversion*) yang lebih tinggi dibandingkan pasangan sesama Asia. Secara spesifik, tingkat keterbukaan (*openness*) dan ekstrasversi (*extraversion*) yang lebih tinggi pada individu Asia dalam perkawinan antar-budaya dimungkinkan memberikan dorongan kepada individu untuk melakukan pendekatan yang aktif, ramah dan terbuka kepada orang lain dan kemudian mendorong pada keputusan untuk menjalin hubungan dengan pasangan dari budaya yang berbeda, sedangkan tingkat keterbukaan (*openness*) dan sifat kehati-hatian (*conscientiousness*) mendorong individu Asia dalam perkawinan antar-budaya untuk melakukan diskusi dan bersepakat mengenai pengelolaan konflik dalam perkawinan serta berhati-hati terhadap pemikiran dan perasaan pasangannya. Ketiga karakteristik kepribadian tersebut secara umum merupakan kekuatan bagi individu Asia dalam perkawinan antar-budaya untuk meningkatkan stabilitas dalam perkawinannya (Lee, *et al.*, 2017).

Di sisi lain, dalam relasi perkawinan antar-budaya, terdapat perbedaan aturan dan nilai-nilai budaya yang dibawa oleh kedua individu sejak kecil dan sangat dimungkinkan bertentangan satu sama lain sehingga dapat mempersulit proses adaptasi dalam perkawinan dan menambah kemungkinan terjadinya konflik dari waktu ke waktu. Perbedaan aturan dan nilai-nilai budaya tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan bias dalam menilai pasangan. Hal tersebut ditunjukkan dalam penelitian Skinner dan Hudac (2017) yang menemukan adanya bias afektif pada pasangan antar-budaya yang memprediksikan kecenderungan prasangka dan tindakan diskriminatif sehingga pasangan antar-budaya sangat dimungkinkan untuk menghadapi

suatu hubungan yang mengandung prasangka dan tindakan diskriminasi dalam relasi perkawinannya.

Secara umum, dalam sebuah hubungan perkawinan, baik dalam satu budaya maupun berbeda budaya, selalu terdapat potensi konflik yang dikarenakan adanya pemikiran dan perasaan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pasangan terhadap relasi perkawinan (Santrock, 2002). Perbedaan pemikiran dan perasaan tersebut dimungkinkan akan menyebabkan perbedaan dalam hal kemungkinan respon terhadap konflik. Pada situasi tertentu, kemungkinan respon terhadap konflik yang paling umum dan paling tidak adaptif bagi pasangan yang tidak sependapat adalah dengan mengeluarkan kata-kata atau melakukan tindakan yang bersifat bermusuhan yang akan menimbulkan respon yang lebih negatif dan lebih merusak (Baron & Byrne, 2005). Kamp Dush dan Taylor (2012) menyebutkan bahwa sikap bermusuhan terhadap pasangan cenderung ditunjukkan oleh pasangan yang merasakan tingkat kebahagiaan perkawinan yang rendah dan mengalami konflik pada taraf yang sedang dan tinggi.

Hurlock (2003) mengemukakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi karena di dalam perkawinan, terdapat kerumitan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak biasa muncul dalam kehidupan individu secara personal. Kerumitan tersebut akan semakin bertambah dalam relasi perkawinan antar-budaya sehingga untuk dapat mempertahankan keberlangsungan perkawinan antar-budaya, diperlukan proses adaptasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk dapat mengelola konflik akibat perbedaan budaya. Secara spesifik, Apriani, *et al.* (2013) menyebutkan bahwa proses adaptasi pasangan dipengaruhi oleh faktor personal (karakteristik

pribadi, usia saat menikah dan pendidikan), faktor budaya (latar belakang budaya), dan faktor sosial (keterlibatan dalam lingkungan sosial, pengalaman berhubungan dengan lawan jenis dan penyesuaian terhadap keluarga pasangan).

Secara umum, masalah-masalah dalam perkawinan muncul karena hubungan interpersonal dalam perkawinan jauh lebih sulit untuk disesuaikan daripada dalam kehidupan bisnis (Hurlock, 2003). Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perbedaan individual dalam perkawinan akan dimungkinkan menimbulkan konflik, pertengkaran atau percecokan, bahkan dapat berakhir dengan perceraian (Dariyo, 2003). Penelitian Smith, Maas, & van Tubergen (2012) yang melibatkan 116.745 pasangan yang bercerai pada kurun waktu 1995-2008 di Belanda menunjukkan bahwa resiko perceraian lebih tinggi ditemukan pada pasangan antar-budaya, khususnya jika pasangan lahir dan dibesarkan di negara yang memiliki perbedaan kultural yang jauh satu sama lain. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan bercerai pada negara asal istri, maka akan semakin tinggi resiko perceraian dari pasangan. Lainiala dan Säävälä (2013) mengungkapkan sebanyak 20% responden berkebangsaan Finlandia yang menikah dengan orang dari negara lain atau keturunan pendatang (N=924) menyatakan bahwa mereka memiliki pemikiran dan pertimbangan untuk bercerai.

Potensi konflik akibat perbedaan budaya yang beresiko menimbulkan pemikiran dan pertimbangan untuk bercerai merupakan hal yang krusial untuk dicermati karena meskipun potensi konflik selalu tetap ada dalam setiap relasi perkawinan, pemahaman mengenai akar penyebab konflik akibat perbedaan budaya dan bagaimana langkah mengelola konflik

secara tepat menjadi hal yang idealnya dimiliki oleh setiap pasangan, terlebih oleh pasangan antar-budaya. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas lebih dalam mengenai aspek-aspek individual dalam perbedaan budaya sebagai faktor pemicu konflik dalam perkawinan antar-budaya dan kemudian model yang efektif untuk mengelola konflik agar masing-masing pasangan antar-budaya mampu mencapai kualitas, kepuasan dan kebahagiaan perkawinan yang dapat mempertahankan keberlangsungan perkawinannya hingga masa usia lanjut.

Aspek-aspek Individual dalam Perbedaan Budaya sebagai Faktor Pemicu Konflik dalam Perkawinan Antar-Budaya

Budaya merupakan sesuatu yang bersifat universal, namun perwujudannya memiliki ciri-ciri khusus yang mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan (Soekanto, 2004). Dengan kata lain, salah satu perwujudan budaya tercermin dalam perilaku tipikal yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Perilaku tipikal yang berbeda tersebut merupakan hasil dari proses yang melibatkan aspek kognisi, emosi dan bahasa (Matsumoto, 2008).

Matsumoto (2008) mengemukakan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup seluruh proses mental yang mengubah masukan-masukan dari indera menjadi pengetahuan. Dalam hal ini, salah satu proses mental yang paling mendasar adalah cara bagaimana individu mengelompokkan berbagai hal ke dalam kategori-kategori. Individu melakukan kategorisasi berdasarkan kemiripan satu sama lain dan melekatkan label untuk mengelompokkan hal-hal yang tampak memiliki kemiripan

sehingga kemudian menciptakan kategori-kategori dari hal-hal yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ketika ada perbedaan pengalaman kultural, individu yang berasal dari budaya yang berbeda akan membuat penilaian yang sangat berbeda mengenai berbagai hal (Matsumoto, 2008).

Proses kategorisasi kognitif yang disebabkan oleh pengalaman kultural yang berbeda pada pasangan antar-budaya dapat menimbulkan cara pandang yang berbeda pula terhadap masalah yang dihadapi di dalam perkawinan. Cara pandang yang berbeda tersebut akan sangat dimungkinkan menjadi pemicu konflik. Dengan kata lain, pasangan antar-budaya akan menilai suatu masalah dalam kehidupan rumah tangganya, baik yang disebabkan oleh pengalaman sehari-hari maupun oleh perbedaan-perbedaan budaya yang ada, dari sudut pandang yang berbeda, bahkan dimungkinkan sangat bertolak belakang. Sebagai contoh, penelitian Forry, Leslie & Letiecq (2007) mengungkapkan bahwa para isteri dari berbagai budaya mengekspresikan cara pandang yang lebih egaliter serta pandangan terhadap hubungan perkawinan yang lebih tidak adil daripada yang ditunjukkan oleh para suami. Korelasi antara ketidakadilan yang dirasakan dengan kualitas perkawinan yang buruk pada pasangan dengan budaya yang sama juga ditemukan pada pasangan antar-budaya (Forry, *et al.*, 2007). Perbedaan kategorisasi kognitif dalam hal cara pandang mengenai peran suami dan istri dalam perkawinan juga tampak dalam riset yang dilakukan oleh Lee dan Ono (dalam Allendorf & Ghimire, 2013) bahwa perkawinan yang baik di Jepang dipahami secara umum sebagai keadaan di mana suami bekerja dan istri tidak bekerja, sedangkan kemampuan suami sebagai tulang punggung keluarga dianggap tidak

terlalu menentukan gambaran perkawinan yang baik di Amerika.

Terkait penilaian kognitif yang mendeskripsikan perkawinan dan peran suami-istri dalam perkawinan, penelitian Kline, Zhang, Manohar, Ryu, Suzuki, & Mustafa (2012) menemukan bahwa individu dewasa muda Asia dan Amerika menominasikan karakteristik yang sama dalam mengidentifikasi gambaran tentang perkawinan dan peran suami-istri di mana mereka secara konsisten mengajukan gambaran akan rasa cinta/perhatian, kepercayaan/kejujuran, dukungan dan rasa hormat sebagai atribut kunci terhadap gambaran suami, istri dan perkawinan yang baik, dan atribut yang sebaliknya untuk gambaran suami, istri dan perkawinan yang buruk. Partisipan Asia dan Amerika juga menominasikan kesetiaan dan komunikasi sebagai atribut kunci gambaran dan peran dalam perkawinan. Penemuan dari penelitian tersebut memberikan gambaran akan adanya kesamaan dalam rangkaian karakteristik yang digunakan oleh masyarakat dewasa muda Asia dan Amerika dalam berpikir tentang perkawinan dan peran suami-istri. Meskipun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan kultural yang spesifik antara dewasa muda Asia dan Amerika perihal gambaran perkawinan dan peran suami-istri, seperti dalam hal fokus pada keluarga di mana partisipan Asia dilaporkan lebih tinggi daripada partisipan Amerika (Kline, *et al.*, 2012).

Aspek kognisi juga berhubungan dengan pemaknaan dan ekspektasi terhadap perkawinan. Penelitian Bugay dan Delevi (2010) menggali tentang pemaknaan dan ekspektasi individu dari budaya kolektivistik yang berdomisili di negara individualistik. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa tinggal dalam suatu budaya individualistik dapat memengaruhi aspek-aspek tertentu dari ekspektasi indi-

vidu kolektivistik tentang perkawinan. Salah satu hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah bahwa pemahaman partisipan dari budaya kolektivistik mengenai perkawinan menjadi lebih individualistik, lebih praktis dan menjadi kurang romantis. Artinya, partisipan secara umum telah mengalami sejumlah perubahan yang signifikan pada pemaknaan tentang perkawinan. Ekspektasi mereka telah menjadi lebih serupa dengan nilai-nilai individualistik seperti fokus pada diri sendiri dan kurang konform dengan kelompok meskipun ditemukan adanya persamaan pandangan dengan negara asal mereka terkait usia saat menikah, perkawinan antar-budaya, tanggung jawab keuangan dan rumah tangga, yang dikarenakan nilai-nilai sebelumnya memang telah sesuai dengan nilai-nilai individualistik (Bugay & Delevi, 2010).

Pada ranah afektif, pengungkapan ekspresi emosi juga menjadi sesuatu yang penting dalam membahas perbedaan yang terkandung di dalam budaya. Matsumoto (2008) mengemukakan bahwa ekspresi wajah yang menandakan emosi-emosi dasar (senang, sedih, marah, takut, terkejut dan jijik) ditempatkan pada kategori-kategori yang sama atau dipandang universal dalam berbagai budaya. Universalitas ini berarti bahwa konfigurasi mimik muka masing-masing emosi tersebut secara biologis bersifat bawaan, serupa untuk semua orang dari segala budaya. Dengan demikian, individu dari budaya manapun yang mengalami salah satu dari emosi tersebut seharusnya mengekspresikannya secara sama persis. Akan tetapi, menurut Ekman (dalam Matsumoto, 2008), terdapat perbedaan spesifik dalam ekspresi emosi yang disebut dengan 'aturan pengungkapan kultural' (*cultural display rules*) yang mengatur tampilnya masing-masing emosi

tersebut sesuai dengan situasi sosial yang sedang dihadapi oleh individu.

Ekspresi emosi yang secara biologis bersifat bawaan berpadu dengan aturan-aturan pengungkapan yang bersifat kultural untuk menghasilkan ekspresi-ekspresi emosi dalam interaksi membawa pada kesimpulan bahwa budaya juga memengaruhi pelabelan emosi. Meskipun ada kesepakatan antar-budaya dalam hal emosi apa yang ditampilkan dalam suatu ekspresi wajah, tetap terdapat variasi dalam tingkat kesepakatan tersebut (Matsumoto, 2008). Adanya variasi dalam tingkat kesepakatan tersebut mengakibatkan evaluasi afektif antara budaya satu dengan budaya yang lain dimungkinkan juga mengalami perbedaan di mana suatu ekspresi emosi pada satu budaya dapat diinterpretasikan berbeda dengan yang diinterpretasikan individu dari budaya lain. Dengan kata lain, ketika ada jarak kesenjangan variasi pada masing-masing ekspresi, maka dimungkinkan akan terjadinya perbedaan pelabelan emosi yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman terhadap pasangan. Hal ini membuat masing-masing pasangan antar-budaya perlu mengamati dan mempelajari cara pengungkapan ekspresi emosi pasangannya sepanjang tahun-tahun perkawinan agar kesepakatan dalam pelabelan emosi pasangan dapat semakin menyatu dan konflik akibat variasi interpretasi emosi yang berkesenjangan pun dapat semakin direduksi.

Aspek individual lainnya dalam perkawinan antar-budaya adalah permasalahan terkait bahasa. Matsumoto (2008) mengemukakan bahwa penilaian seseorang tentang orang lain juga tergantung pada bahasa yang sedang digunakan oleh orang tersebut. Lebih lanjut, Matsumoto mengungkapkan bahwa individu yang menguasai multi-bahasa (bilingual) cenderung berpikir dan berperasaan secara berbeda

tergantung pada konteks linguistik mereka pada saat itu, artinya ada konsep diri yang berbeda tergantung pada bahasa mana yang sedang digunakan. Selain itu, individu bilingual cenderung melekatkan atau mengafiliasikan diri pada nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dari budaya yang diasosiasikan dengan bahasa yang sedang mereka gunakan. Saat bahasanya berganti, nilai-nilai kultural yang terafiliasi pun ikut berganti (Matsumoto, 2008). Terkait dengan kendala bahasa yang dapat menghambat komunikasi antar-budaya, Mafela (2012) menyatakan bahwa kekurangan pengenalan bahasa dari masyarakat budaya lain dapat berakibat pada miskomunikasi yang besar. Hal ini berarti bahwa pemaknaan dan penguasaan multi-bahasa yang baik dalam komunikasi dengan pasangan merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh masing-masing pasangan antar-budaya agar mampu meminimalkan potensi konflik akibat perbedaan bahasa dan mencapai suatu hubungan komunikasi yang memuaskan satu sama lain.

Secara keseluruhan, perbedaan kultural dalam aspek kognisi, afeksi dan bahasa pada perkawinan antar-budaya dimungkinkan dapat beresiko menimbulkan potensi konflik yang akan mengakibatkan ketidakpuasan terhadap relasi perkawinan sehingga strategi atau model manajemen konflik yang digunakan oleh masing-masing pihak akan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian konflik yang muncul dalam perkawinan yang pada akhirnya berujung pada penentuan pencapaian kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan antar-budaya.

Manajemen Konflik dalam Relasi Perkawinan Antar-Budaya

Munculnya konflik perkawinan dan respon terhadap konflik dapat menjadi salah satu faktor determinan bagi kualitas perkawin-

an. Allendorf dan Ghimire (2013) mengungkapkan bahwa kualitas perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan keluarga yang membentuk kesejahteraan. Kualitas perkawinan yang lebih baik diasosiasikan dengan tingkat depresi yang rendah, taraf kesehatan yang lebih baik, penyakit fisik yang rendah, serta menjadi faktor penting bagi keputusan untuk bercerai atau tidak (Allendorf & Ghimire, 2013).

Menurut Baron dan Byrne (2005), kunci kualitas sebuah perkawinan tidak terletak pada kemampuan untuk menghindari semua kesulitan yang muncul akibat konflik, namun pada kemampuan untuk menghadapi masalah dengan cara yang memuaskan. Terkait strategi menghadapi masalah, terdapat lima jenis model manajemen konflik yang dikemukakan oleh Rahim (dalam Cheng, 2010), yaitu: 1) *Integrating style* (model mengintegrasikan), mencakup perhatian yang tinggi pada diri sendiri dan orang lain. Model ini mengacu pada penggunaan metode pencarian solusi terhadap masalah untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak. 2) *Compromising style* (model kompromi), mencakup perhatian dalam taraf sedang pada diri sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan model ini, pasangan mencoba mencari persetujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, tetapi mungkin persetujuan tersebut bukan merupakan pilihan favorit salah satu pihak. 3) *Obligating style* (model mengharuskan), meliputi perhatian yang rendah bagi diri sendiri dan perhatian yang tinggi kepada orang lain di mana seseorang mencoba meminimalisir konflik dengan mengakomodasi kebutuhan orang lain dan memberikan sesuai dengan harapan mereka. 4) *Dominating style* (model menguasai), merefleksikan perhatian yang tinggi pada diri sendiri dan perhatian yang

rendah kepada orang lain. Ketika menggunakan model ini, individu mencoba mengendalikan atau mendominasi orang lain. 5) *Avoiding style* (model menghindari), di mana seseorang akan berusaha menghindari situasi atau potensi konflik.

Penelitian tentang perkawinan antarbudaya yang dilakukan oleh Cheng (2010) pada para pria berkebangsaan Taiwan yang menikah dengan para wanita yang berasal dari Indonesia, Cina, Vietnam dan Thailand, membuktikan adanya korelasi positif yang signifikan antara kepuasan perkawinan dan penggunaan model *integrating* (mengintegrasikan) dan *compromising* (kompromi). Secara umum, model manajemen *integrating* (mengintegrasikan) dan *compromising* (kompromi) ditemukan sebagai model manajemen konflik yang disukai baik oleh suami dan istri dalam hubungan tradisional maupun non-tradisional di mana kedua model tersebut kemudian membawa masing-masing pasangan pada tingkat pencapaian kepuasan perkawinan yang lebih besar (Cheng, 2010). Bukti lainnya dari penelitian Cheng (2010) mengemukakan bahwa baik suami berkebangsaan Taiwan dan istri yang berasal dari negara lain akan menggunakan *dominating style* (model menguasai) paling sedikit dibanding empat jenis model manajemen konflik lainnya, kemudian ditemukan pula bahwa suami berkebangsaan Taiwan dan istri dari negara berbeda merasakan pengalaman yang sama dengan orang-orang Asia lainnya yang menekankan keharmonisan hubungan. Penemuan ini sekaligus mendukung pemikiran bahwa keharmonisan keluarga masih dianggap penting dalam perkawinan antarbudaya (Cheng, 2010).

Terkait dengan hal tersebut, hasil penelitian Iqbal, Gillani, & Kamal (2013) pada 260 sampel di Pakistan (130 suami dan 130 istri) yang telah menikah selama 5-20 tahun mengungkapkan bahwa tidak ada

perbedaan gender yang signifikan dalam melakukan manajemen konflik, yang berarti bahwa suami dan istri cenderung memilih model yang sama dalam melakukan manajemen konflik. Riset Bustamante, Nelson, Henriksen, & Monakes (2011) juga menunjukkan bahwa pasangan antar-budaya cenderung menggunakan strategi koping yang sama dalam mengelola stresor perkawinan akibat perbedaan budaya. Greeff & de Bruyne (dalam Cheng, 2010) berpendapat bahwa suami dan istri yang memiliki kesepakatan tentang bagaimana konflik dikelola akan cenderung lebih bahagia dengan kehidupan perkawinannya. Hal tersebut juga terbukti dalam hasil penelitian Kamp Dush dan Taylor (2012) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kerjasama pasangan dalam membuat keputusan manajemen konflik, maka akan semakin kecil pula potensi konflik yang ada dalam perkawinan, yang kemudian juga diasosiasikan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi.

Selain model manajemen konflik, kunci lainnya untuk mengatasi konflik dalam perkawinan adalah komunikasi dua arah yang baik dan efektif sehingga segala masalah yang timbul dalam perkawinan dapat terselesaikan dengan baik (Dariyo, 2003). Menurut Walgito (2003), komunikasi dua arah adalah komunikasi yang menempatkan pihak penerima pesan lebih aktif di mana penerima pesan dapat memberikan tanggapan sebagai umpan balik tentang pesan yang diterima dari pemberi pesan sehingga kedua belah pihak sama-sama aktif dan seimbang dalam proses komunikasi dan dapat saling memberikan umpan balik dalam berkontribusi menyelesaikan masalah. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Tili dan Barker (2015) bahwa strategi mendasar untuk memetakan dan menghadapi konflik secara konstruktif meliputi perubahan

sudut pandang dan penggunaan komunikasi terbuka di mana komunikasi pasangan antar-budaya dipengaruhi oleh perkembangan diri, kelancaran penggunaan bahasa dan perbedaan antara model komunikasi *high-context* dan *low-context*. Selain itu, kesadaran diri, keterbukaan pikiran, ekspresi rasa hormat dan penyingkapan diri dipandang sebagai aspek penting dari kompetensi komunikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh pasangan (Tili & Barker, 2015).

Komunikasi dua arah secara terbuka pada pasangan dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dalam perkawinan di mana baik suami maupun istri dapat bersama-sama menganalisis dan saling menanggapi proses penyelesaian masalah. Dari penelitian Cheng (2010), model manajemen *integrating* (mengintegrasikan) dan *compromising* (kompromi) menjadi model penyelesaian konflik yang melibatkan komunikasi dua arah dan lebih efektif dalam melakukan pendekatan terhadap konflik dalam perkawinan antar-budaya yang kemudian berkorelasi dengan kepuasan perkawinan. Dengan kata lain, kedua model manajemen konflik tersebut akan mendorong masing-masing individu untuk melakukan akomodasi terhadap pasangannya satu sama lain. Akomodasi merupakan salah satu cara individu untuk menempatkan hubungan dengan pasangan di atas kepentingan pribadinya (Nurhayati & Helmi, 2013). Individu dalam relasi perkawinan akan melakukan akomodasi karena dengan melakukan akomodasi, mereka akan dapat meningkatkan kesejahteraan pasangan dan kualitas perkawinannya (Lipkus & Bissonnette, dalam Nurhayati & Helmi, 2013). Dengan demikian, tampak bahwa cara pengelolaan dan penyelesaian konflik yang berusaha mengakomodasi kepentingan pasangan dalam hubungan perkawinan akan dapat

meningkatkan kepuasan, kualitas dan kebahagiaan dalam perkawinan dengan tidak mengekspresikan emosi negatif, seperti: rasa takut, kecemasan dan rasa marah dalam relasi perkawinan, serta mengatasi kekecewaan akibat berkurangnya rasa cinta dan menurunnya pengungkapan afeksi yang tampak seiring waktu berjalan (Cheng, 2010).

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa kualitas, kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan menjadi faktor penting bagi keputusan untuk bercerai, pencapaian kualitas, kepuasan dan kebahagiaan perkawinan yang baik dapat menjadi penentu keberlangsungan sekaligus 'benteng' yang menjaga perkawinan antar-budaya menjadi sebuah perkawinan jangka panjang hingga tahap usia lanjut. Dengan kata lain, perkawinan jangka panjang yang bahagia, berkualitas dan memuaskan hingga masa tua dapat disebut sebagai perkawinan yang berhasil. Perkawinan yang berhasil cenderung berfokus pada pertemanan, komitmen, kepercayaan, dukungan sosial, kesamaan dan kebulatan tekad yang konsisten untuk menciptakan afek yang positif (Adams & Jones; Cobb, Davila & Bradburry; Lauer & Lauer; Wieselquist, *et al.*, dalam Baron & Byrne, 2005).

Afek positif yang turut membentuk kepuasan perkawinan dapat menjadi faktor pendukung bagi keberlangsungan perkawinan yang lebih lama hingga masa dewasa akhir. Individu dewasa akhir yang masih tetap berada dalam hubungan perkawinan cenderung lebih berbahagia dibandingkan dengan individu yang tidak berada dalam hubungan perkawinan (Lee, dalam Santrock, 2002), dan pasangan usia tua yang tetap berada dalam relasi perkawinan mengekspresikan lebih banyak afek positif dibandingkan dengan pasangan muda ataupun pasangan usia tengah baya (Levenson, Carstensen & Gottman, dalam

Baron & Byrne, 2005). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilihan dan penggunaan model manajemen konflik serta penggunaan komunikasi yang baik, efektif dan saling mengakomodasi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki khususnya oleh setiap pasangan berbeda budaya agar dapat mencapai kualitas, kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan yang kemudian dapat mengantarkan keberlangsungan relasi perkawinan antar-budaya tersebut hingga usia senja tiba.

Penutup

Individu dalam relasi perkawinan yang berasal dari budaya yang berbeda tidak dapat begitu saja melepaskan akar budayanya sejak lahir. Akan tetapi, individu dalam perkawinan antar-budaya dapat melakukan proses adaptasi dengan nilai-nilai kultural pasangannya hingga saling berkesesuaian satu sama lain. Hal ini penting sebagai salah satu pondasi utama keberlangsungan perkawinan antar-budaya. Di sisi lain, oleh karena adanya perbedaan kultural individu dalam aspek kognisi, afeksi dan bahasa, diperlukan proses adaptasi budaya untuk dapat memahami dan menerima secara utuh berbagai perbedaan dalam budaya pasangan satu sama lain. Selama proses adaptasi berlangsung, dimungkinkan adanya potensi konflik yang dapat mengancam keberlangsungan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan model manajemen konflik yang tepat untuk mengelola konflik yang timbul dari waktu ke waktu dalam relasi perkawinan antar-budaya.

Model manajemen konflik diperlukan dalam mencegah potensi konflik baru dan mengatasi situasi konflik yang terkadang muncul dalam relasi perkawinan antar-budaya. Model manajemen *compromising* (kompromi) dan *integrating* (mengintegras-

kan) ditemukan sebagai model manajemen konflik yang menjadi preferensi suami dan isteri pada budaya kolektivistik dan membuka komunikasi dua arah yang baik dan efektif untuk mendorong masing-masing individu mengakomodasi kepentingan pasangannya dan menuntun pada upaya penyelesaian konflik. Dengan memilih, menyepakati dan menggunakan model manajemen konflik yang tepat secara bersama-sama, diharapkan pasangan berbeda budaya mampu mencapai kualitas, kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan yang dapat mempertahankan keberlangsungan hubungan perkawinan antar-budaya yang dijalannya hingga usia senja tiba.

Daftar Pustaka

- Allendorf, K., & Ghimire, D. J. (2013). Determinants of marital quality in an arranged marriage society. *Social Science Research, 42*(1), 59–70.
- Apriani, N., Sakti, H., & Fauziah, N. (2013). Penyesuaian diri wanita etnis Jawa yang menikah dengan pria etnis Cina. *Empati, 2*(4), 305–315.
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Psikologi sosial jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Penduduk menurut wilayah, jenis kelamin, dan status migrasi seumur hidup*. Diunduh dari <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=324&wid=0> diakses pada tanggal 2 November 2017.
- Bugay, A., & Delevi, R. (2010). "How can I say I love you to an American man and mean it?" Meaning of marriage among Turkish female students living in the U.S. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5*, 1464–1470.
- Bustamante, R. M., Nelson, J. A., Henriksen, R. C., & Monakes, S. (2011). Intercultural couples: Coping with culture-related stressors. *The Family Journal, 19*(2), 154–164.
- Cheng, C. C. (2010). A study of intercultural marital conflict and satisfaction in Taiwan. *International Journal of Intercultural Relations, 34*(4), 354–362.
- Dariyo, A. (2003). *Psikologi perkembangan dewasa muda*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Djamba, Y. K., & Kimuna, S. R. (2014). Are Americans really in favor of interracial marriage? A closer look at when they are asked about black-white marriage for their relatives. *Journal of Black Studies, 45*(6), 528–544.
- Forry, N. D., Leslie, L. A., & Letiecq, B. L. (2007). Marital quality in interracial relationships: The role of sex role ideology and perceived fairness. *Journal of Family Issues, 28*(12), 1538–1552.
- Grapes, B. J. (Ed.). (2000). *Interracial relationships*. San Diego, Calif: Greenhaven Press.
- Herman, M. R., & Campbell, M. E. (2012). I wouldn't, but you can: Attitudes toward interracial relationships. *Social Science Research, 41*(2), 343–358.
- Hurlock, E. B. (2003). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Iqbal, N., Gillani, N., & Kamal, A. (2013). Conflict management styles and its outcome among married couples. *FWU Journal of Social Sciences, 7*(1), 33–38.
- Kamp Dush, C. M., & Taylor, M. G. (2012). Trajectories of marital conflict across the life course: Predictors and interactions with marital happiness trajectories. *Journal of Family Issues, 33*(3), 341–368.
- Kline, S. L., Zhang, S., Manohar, U., Ryu, S., Suzuki, T., & Mustafa, H. (2012). The role of communication and cultural concepts in expectations about

- marriage: Comparisons between young adults from six countries. *International Journal of Intercultural Relations*, 36(3), 319–330.
- Lainiala, L., & Säävälä, M. (2013). Intercultural marriages and consideration of divorce in Finland: Do value differences matter? *The Population Research Institute*. Accessed, 10, 2016.
- Lee, S., Balkin, R. S., & Fernandez, M. A. (2017). Asian intercultural marriage couples in the united states: A study in acculturation and personality traits. *The Family Journal*, 25(2), 164–169.
- Lewis Jr, R., & Ford-Robertson, J. (2010). Understanding the occurrence of interracial marriage in the United States through differential assimilation. *Journal of Black Studies*, 41(2), 405–420.
- Luke, D. J., & Oser, C. B. (2015). Ebony and Ivory? Interracial dating intentions and behaviors of disadvantaged African American women in Kentucky. *Social Science Research*, 53, 338–350.
- Mafela, M. J. (2012). Intercultural communication and personal relationships: A study in the translation of tshivena kinship terminology. *Intercultural Communication Studies*, 21(1), 266–275.
- Matsumoto, D. (2008). *Pengantar psikologi lintas budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, S. R., & Helmi, A. F. (2013). Marital flourishing: Kualitas perkawinan dalam teori eudaimonik. *Buletin Psikologi*, 21(2), 68–79.
- Okamoto, D. G. (2007). Marrying out: A boundary approach to understanding the marital integration of Asian Americans. *Social Science Research*, 36(4), 1391–1414.
- Santrock, J. W. (2002). *Life-span development*. Jakarta: Erlangga.
- Skinner, A. L., & Hudac, C. M. (2017). “Yuck, you disgust me!” Affective bias against interracial couples. *Journal of Experimental Social Psychology*, 68, 68–77.
- Smith, S., Maas, I., & van Tubergen, F. (2012). Irreconcilable differences? Ethnic intermarriage and divorce in the Netherlands, 1995–2008. *Social Science Research*, 41(5), 1126–1137.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Spörlein, C., Schlueter, E., & van Tubergen, F. (2014). Ethnic intermarriage in longitudinal perspective: Testing structural and cultural explanations in the United States, 1880–2011. *Social Science Research*, 43, 1–15.
- Tili, T. R., & Barker, G. G. (2015). Communication in Intercultural marriages: Managing cultural differences and conflicts. *Southern Communication Journal*, 80(3), 189–210.
- Tuapattinaya, Y. I. F., & Hartati, S. (2014). Pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis: Studi fenomenologis pada perempuan jawa. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(1), 34–41.
- Walgito, B. (2003). *Psikologi sosial (Suatu pengantar)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wang, W. (2012). The rise of intermarriage. *Washington, DC: Pew Research Center*. Retrieved August, 13, 2012.
- Data pernikahan campur di Indonesia masih minim. (2015). Merdeka.com. Diunduh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim.html>. diakses pada tanggal 2 November 2017.